

Reformasi Birokrasi Mendorong Perbaikan Layanan Publik

Upaya Pemerintah melakukan reformasi birokrasi di jajaran Pemerintah, membuahkan hasil perbaikan kualitas layanan publik. Berikut ini adalah beberapa perbaikan layanan publik yang dihasilkan dari proses reformasi birokrasi tersebut.



POLRI

Layanan Publik	Sebelum	Sesudah
Pelayanan Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM)		
a. Penerbitan SIM Baru dengan persyaratan sudah lengkap dan lulus ujian	1 hari	120 menit
b. Perpanjangan SIM dengan persyaratan lengkap	1 hari	60 menit
Pelayanan Penerbitan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)		
a. Penerbitan BPKB baru setelah persyaratan lengkap	1 hari	120 menit
b. Mutasi BPKB setelah persyaratan lengkap	1 hari	180 menit
Layanan Komputerisasi BPKB dan STNK Online	Belum tersedia	Telah tersedia di 7 Polda (Jabar, Jateng, Jatim, Bali, DIY, Kepri dan Banten)
Pelayanan Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)		
a. Penerbitan STNK Baru setelah persyaratan lengkap	240 Menit	120 Menit
b. Penerbitan STNK Perubahan setelah persyaratan lengkap	120 Menit	60 Menit
c. Penerbitan STNK Perpanjangan setelah persyaratan Lengkap	60 Menit	30 Menit
d. Pengesahan STNK setelah persyaratan lengkap	60 Menit	30 Menit
Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)		
a. Penerbitan SKCK di Polda/Polres/Polsek, setelah berkas diterima lengkap	Lebih dari 3 hari	1 hari kerja
b. Penerbitan SKCK di Mabes Polri setelah berkas diterima lengkap	Lebih dari 3 hari	2 jam
Publikasi Online Statistik Kriminal	Belum tersedia	Telah tersedia publikasi statistik kriminal di website Polri (http://ncic.polri.go.id/pusiknas) statistik kriminal tingkat Polda yang memuat tentang antara lain Presentase laporan yang masuk.
Publikasi Online Penanganan Perkara	Belum tersedia	Telah tersedia publikasi penanganan perkara di website Polri (http://ncic.polri.go.id/pusiknas) perkembangan penanganan perkara tingkat Polda, meliputi: Laporan Polisi, Kronologi Perkembangan Penyidikan yang dilaporkan melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dan Penghentian Penyidikan melalui Surat Pemberitahuan Pemberhentian Penyidikan (SP3)
Pelayanan SIM Keliling	Belum tersedia secara luas.	Telah tersedia tambahan 50 unit SIM Keliling ke Polda NAD, SUMUT, SUMBAR, Riau, SUMSEL, Lampung, Bengkulu, Jambi, PMJ, JABAR, JATENG, JATIM, DIY, Bali, NTB, NTT, KALBAR, KALSEL, KALTENG, KALTIM, SULSEL, SULTRA, SULUT, SULTENG, Maluku, Papua, BABEL, MALUT, Gorontalo, Banten dan KEPRI

Kementerian Dalam Negeri

Layanan Publik	Sebelum	Sesudah
a. Pelayanan Dokumen Kependudukan Pengurusan penerbitan dokumen kependudukan (KK,KTP,Akte Pencatatan Sipil)	Dipungut Biaya	Bebas biaya di seluruh Indonesia
b. Penerbitan Akte Kelahiran	Harus di tempat kelahiran	Dapat dilakukan di tempat domisili pemohon
c. Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar tentang Organisasi Kemasyarakatan	Belum Ada	Tidak Dipungut Biaya, waktu 1 hari kerja





Dinas Kependudukan dan Capil DKI

Layanan Publik	Sebelum	Sesudah
a. Pelayanan Akte Kelahiran	Lebih dari 10 Hari Kerja	Maksimal 5 Hari Kerja
b. Penerbitan Kartu Keluarga	Lebih dari 10 Hari Kerja	Maksimal 5 Hari Kerja



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Layanan Publik	Sebelum	Sesudah
Penyediaan sistim pendaftaran didik baru secara online untuk SMP dan SMA di 60 kabupaten kota (untuk SD, SMP, SMA baru di Kota Batam).	Belum Tersedia	Telah tersedia di 60 kabupaten kota (untuk SD, SMP, SMA baru di Kota Batam).



Badan Kepegawaian Nasional (BKN)

Layanan Publik	Sebelum	Sesudah
a. Penggunaan Computer Assisted Test (CAT) untuk seleksi CPNS	Dilakukan di beberapa Kementerian/Lembaga	Dilakukan untuk seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi di seluruh Indonesia
b. Seleksi Pejabat Eselon I dan II	Dilakukan di beberapa Kementerian/ Lembaga	Seleksi terbuka melalui Assessment Center, untuk Eselon 1 untuk seluruh Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia



Badan Pertanahan Nasional

Layanan Publik	Sebelum	Sesudah
Kemudahan Pelayanan Pertahanan		
a. Percepatan Pengecekan Sertifikat	Diatas 3 hari kerja	1 hari kerja
b. Pelayanan sertifikat jual beli tanah	Diatas 7 hari kerja	5 hari kerja
c. Roya Hak Tanggungan	Diatas 7 hari kerja	5 hari kerja
d. Peningkatan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik	Diatas 7 hari kerja	5 hari kerja



TASPEN

Layanan Publik	Sebelum	Sesudah
a. Pelayanan Pengurusan / Pengajuan Klaim	Belum langsung dicairkan	Pelayanan yang datang langsung di Kantor Taspem Tangerang, Bekasi dan Depok dapat langsung dicairkan pada hari yang sama jika persyaratan telah lengkap.
b. Pelayanan keliling	Belum tersedia	Tersedia pelayanan mobil keliling untuk pelayanan ke Kementerian/Lembaga dan Wilayah berdasarkan panggilan.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan(TNP2K)



Layanan Publik	Sebelum	Sesudah
Penyediaan Basis Data Terpadu untuk pelaksanaan program perlindungan sosial	Data tidak terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> Telah tersedia Basis Data Terpadu (BDT) berdasarkan nama dan alamat dengan lebih dari 25 informasi dasar/ variabel untuk 40 persen Rumah Tangga dengan status sosial ekonomi terendah untuk kepentingan penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan ataupun program perlindungan sosial bersasaran rumah tangga. Data ini dapat diminta secara resmi tanpa dipungut biaya untuk Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang melaksanakan program terkait. BDT saat ini telah digunakan oleh Kementerian / Lembaga dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga dan juga telah digunakan oleh seluruh Pemerintah Provinsi serta tidak kurang dari 350 Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia. Telah tersedia akses data sebaran menurut 16 indikator sosial-ekonomi menurut wilayah dari Provinsi sampai tingkat Desa. Data ini dapat digunakan bagi analisis dan kegiatan perencanaan program bagi para peneliti yang dapat diakses secara bebas dan tidak dipungut biaya melalui www.tnp2k.go.id dalam bentuk tabel-tabel statistik maupun peta. TNP2K menyediakan staf yang ahli dibidangnya untuk memberikan layanan konsultasi mengenai pemanfaatan BDT tanpa dipungut biaya.